



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0003595

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan  
Data

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HIKMAH PISANG BARU  
BUMI AGUNG WAY KANAN**

Kepada Yth.  
Notaris ARIS YUSUF  
M, SH., M.KN .  
Jalan Lintas  
Sumatera Nomor : 20  
KABUPATEN WAY  
KANAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 02, tanggal 01 September 2016 yang dibuat oleh Notaris ARIS YUSUF M, SH., M.KN , berkedudukan di KABUPATEN WAY KANAN, mengenai perubahan Pembina, **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HIKMAH PISANG BARU BUMI AGUNG WAY KANAN**, berkedudukan di KABUPATEN WAY KANAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 07 September  
2016.

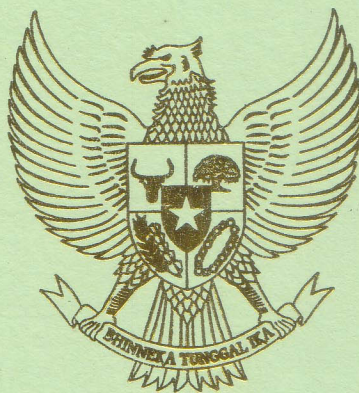


a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**

DICETAK PADA TANGGAL 07 September 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR 721518 TANGGAL 07 September 2016**



**ARIS YUSUF M, S.H., M.Kn.**

**NOTARIS**

**&**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**( P P A T )**

**SALINAN**

**AKTA**

**PERUBAHAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HIKMAH**

**PISANG BARU BUMI AGUNG WAY KANAN**

**NOMOR : 02 TANGGAL : 01-09-2016**

SK. MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI Nomor : AHU - 424.AH.02.01. TAHUN 2013  
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Nomor : 156/KEP-17.3/VII/2014 Tanggal : 8 Juli 2014

**JALAN LINTAS SUMATERA NOMOR 20 KELURAHAN TIUH BALAK PASAR**

**KECAMATAN BARADATU - KABUPATEN WAY KANAN 34761**

**TELEPON & FAX. 0723 - 4760877**

**PERUBAHAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL – HIKMAH**

**PISANG BARU BUMI AGUNG WAY KANAN**

**Nomor : 02**

- Pada hari ini, Kamis, Tanggal 01-09-2016 (Satu September Tahun Duaribu Enambelas) ; -----
- Pukul 10 : 00 WIB (Sepuluh Lewat Nol Nol Waktu Indonesia Barat) ; -----
- Berhadapan dengan saya, -----

----- **ARIS YUSUF M, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** -----  
----- **Notaris di Kabupaten Way Kanan** -----

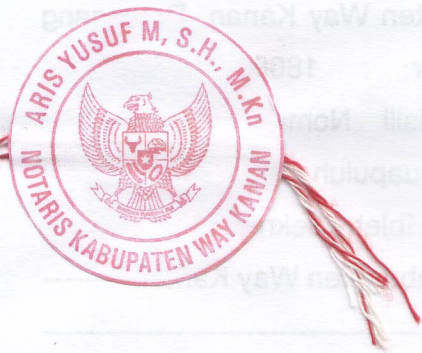
- Dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan ARIS SUWANDI**, Lahir di Oku, pada Tanggal 12-06-1965 (Duabelas Juni Tahun Seribu Sembilanratus Enampuluh Lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Tugu Mulyo, Rukun Tetangga : -, Rukun Warga : -, Kelurahan Tugu Mulyo, Kecamatan Lempung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1602131206650005. -----

- Untuk sementara ini berada di Way Kanan. -----
- Menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini bertindak : -----

- Untuk diri sendiri. -----
- Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, Tanggal 15-08-2016 (Limabelas Agustus Tahun Duaribu Enambelas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, demikian masing-masing untuk dan atas nama : -----

- **Nona NUR ALISA SAFITRI**, Lahir di Batu Raja, pada Tanggal 07-02-1993 (Tujuh Februari Tahun Seribu Sembilanratus Sembilanpuluh Tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswata, bertempat tinggal di Sri Mulyo I, Rukun Tetangga : 001, Rukun Warga : 001, Kelurahan Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1808144702930002. -----



2. **Tuan SAIFUL ANSORI**, Lahir di Kuta Pandan, pada Tanggal 25-04-1980 (Duapuluh Lima April Tahun Seribu Sembilanratus Delapanpuluh), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal Jl. Datu, Rukun Tetangga : 003, Rukun Warga : 003, Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 180804254800003. -----

3. **Tuan EDI SUPENO**, Lahir di Pisang Baru, pada Tanggal 23-03-1979 (Duapuluh Tiga Maret Tahun Seribu Sembilanratus Tujuh puluh Sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal Sri Tanjung II, Rukun Tetangga : 003, Rukun Warga : 003, Desa Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1808142303790001. ----

4. **Tuan AGUS ALIFULLOH**, Lahir di Pisang Baru, pada Tanggal 01-01-1971 (Satu Januari Tahun Seribu Sembilanratus Tujuh puluh Satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Pisang Indah, Rukun Tetangga : 01, Rukun Warga : 01, Kelurahan Pisang Indah, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, Pemegang Kartu Induk Kependudukan Nomor : 1808140101710003, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/010/P-I/SK.D/IV/2016 Tanggal 21-04-2016 (Duapuluh Satu April Tahun Duaribu Enambelas), yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kampung Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan. -----

- Para Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

- Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini : -----

- Bahwa **Tuan NUR AMIN**, **Tuan ARIS SUWANDI** dan **Tuan MASHUDI** adalah segenap pendiri dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah Pisang Baru Bumi Agung Way Kanan, berkedudukan di Way Kanan, yang anggaran dasarnya dibuat dihadapan **MUJIRIYATNO AM**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Lampung Utara, Tanggal 30-08-2012 (Tigapuluh Agustus Tahun Duaribu Duabelas), Nomor : 29, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-01364.50.10.2014, Tanggal 12-05-2014 (Duabelas Mei Tahun Duaribu Empatbelas), dan telah mengalami perubahan dengan Akta tertanggal 15-06-2016 (Limabelas Juni Tahun Duaribu Enambelas),

Nomor : 31, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, untuk selanjutnya disebut "Yayasan".

- Bahwa Nona **NUR ALISA SAFITRI** berkeinginan untuk masuk kedalam Organ Yayasan.
- Bahwa para pendiri Yayasan menerima baik keinginan Nona **NUR ALISA SAFITRI** tersebut untuk masuk kedalam Organ Yayasan.
- Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta izin dari pihak yang berwenang, Para Penghadap sepakat dan setuju untuk merubah Akta Perubahan Yayasan, sehingga terhitung mulai ditandatanganinya akta ini, maka Anggaran Dasar Yayasan berbunyi sebagai berikut :

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

1. Yayasan ini bernama Yayasan "**PENDIDIKAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HIKMAH PISANG BARU BUMI AGUNG WAY KANAN**" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan"), berkedudukan di Dusun Sri Mulyo I, Rukun Tetangga : 001, Rukun Warga : 001, Kampung Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan.
2. Yayasan dapat membuka Kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina.

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

**Pasal 2**

Yayasan mempunyai Maksud dan Tujuan dibidang Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan.

**KEGIATAN**

**Pasal 3**

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Di bidang Sosial antara lain :
  - a. Lembaga pendidikan umum baik formal maupun non formal dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi;
  - b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), panti jompo dan panti wreda;

c. Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium; -----

d. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan; -----

2. Di bidang Kemanusiaan antara lain : -----

a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam; -----

b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang; -----

c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan; -----

d. Memberi bantuan berupa beasiswa untuk melanjutkan pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi; -----

e. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka; -

f. Memberikan perlindungan konsumen; -----

g. Melestarikan lingkungan hidup; -----

3. Di bidang Keagamaan antara lain : -----

a. Mendirikan sarana ibadah; -----

b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah; -----

c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah; -----

d. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----

e. Studi banding keagamaan; -----

f. Menyelenggarakan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH); -----

#### JANGKA WAKTU -----

##### Pasal 4 -----

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

##### KEKAYAAN -----

##### Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai berjumlah **Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)**. -----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari : -----

a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----

b. Wakaf; -----

c. Hibah; -----

d. Hibah wasiat; dan -----

e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

## ORGAN YAYASAN

### Pasal 6

- a. Pembina;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas;

### PEMBINA

### Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina hanyalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

### Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;

- f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas. -----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

##### ----- Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. -----
2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
  - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ini; -----
  - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas; -----
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; -----
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; -----
  - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan; -----
  - f. Pengesahan laporan tahunan; -----
  - g. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

#### ----- RAPAT PEMBINA -----

##### ----- Pasal 10 -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas. -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan rapat harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----



4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau diwakili panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

----- **Pasal 11** -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
  - a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
  - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----
  - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Pembina; -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak. -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : -----

- a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya; -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
- c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara dibuat dengan akta Notaris. -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina maka ia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

#### ----- RAPAT TAHUNAN -----

#### ----- Pasal 12 -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun tutup buku Yayasan ditutup. -----
2. Dalam rapat tahunan Pembina melakukan : -----
  - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----
  - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -----
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. -----

3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. ---

#### ----- PENGURUS -----

##### ----- Pasal 13 -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----
  - a. Seorang Ketua; -----
  - b. Seorang Sekretaris; -----
  - c. Seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

##### ----- Pasal 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan : -----
  - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; -----
  - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. -
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu. -----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong maka jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan Pembina harus

menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas dan Pelaksana Kegiatan. -----

#### ----- Pasal 15 -----

Jabatan Pengurus berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
5. Masa jabatan berakhir. -----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

#### ----- Pasal 16 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : -----
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); -----

- b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri; -----
- c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----
- d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan / memperoleh harta tetap atas nama Yayasan. -----
- e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan / membebani kekayaan Yayasan. -----
- f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f, harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

----- **Pasal 17** -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- **Pasal 18** -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan Ketua Umum berlaku juga baginya. -----

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal ini hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal ini hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
8. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

#### ----- PELAKSANA KEGIATAN -----

#### ----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada pengurus. -----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

#### ----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di depan Pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

## RAPAT PENGURUS

### Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus harus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat Kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

### Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
  - a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah pengurus.
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
  - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.

- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- **Pasal 23** -----

1. Keputusan Rapat pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ada tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----



3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- **Pasal 25** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu. -----
4. Dalam hal jabatan Pengawas kosong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. -----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus dan Pelaksana Kegiatan. -----

----- **Pasal 26** -----

Jabatan pengawas berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
5. Masa jabatan berakhir. -----

## TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

### Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang :
  - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
  - b. Memeriksa dokumen;
  - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau;
  - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
  - e. Memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :
  - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara;
  - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

#### ----- RAPAT PENGAWAS -----

##### ----- Pasal 28 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

##### ----- Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
  - a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Pengawas. -----
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dan terhitung sejak Rapat Pengawas Pertama. -----
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

----- **Pasal 30** -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

## RAPAT GABUNGAN

### Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

### Pasal 32

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

## ----- KUORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

### ----- Pasal 33 -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas, -----
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
  - d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama. -----
  - e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengurus dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Pengawas. -----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----
6. Penandatanganan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan

ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut. -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

#### ----- TAHUN BUKU -----

##### ----- Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

#### ----- LAPORAN TAHUNAN -----

##### ----- Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
  - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----
  - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan. -----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -----

## PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

### Pasal 36

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

### Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

## PENGGABUNGAN

### Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.



2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----

- a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain; -----
- b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; -----
- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -----

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. -----

#### ----- Pasal 39 -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -----

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. -----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. -----

5. Rancangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

## ----- PEMBUBARAN -----

### ----- Pasal 40 -----

1. Yayasan bubar karena : -----
  - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----
  - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
  - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : -----
    1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----
    2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; -----
    3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----
4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----

### ----- Pasal 41 -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa " dalam likuidasi " di belakang nama Yayasan. --
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
4. Dalam pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. -----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
8. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

#### ----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

##### ----- Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

#### ----- PERATURAN PENUTUP -----

##### ----- Pasal 43 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----
2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan -----

Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

**a. PEMBINA** : -----

**Ketua** :

**Nona NUR ALISA SAFITRI**, Lahir di Batu Raja, pada Tanggal 07-02-1993 (Tujuh Februari Tahun Seribu Sembilanratus Sembilanpuluh Tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswata, bertempat tinggal di Sri Mulyo I, Rukun Tetangga : 001, Rukun Warga : 001, Kelurahan Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1808144702930002. -----

**b. PENGURUS** : -----

**Ketua** :

**Tuan ARIS SUWANDI**, Lahir di Oku, pada Tanggal 12-06-1965 (Duabelas Juni Tahun Seribu Sembilanratus Enampuluh Lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Tugu Mulyo, Rukun Tetangga : -, Rukun Warga : -, Kelurahan Tugu Mulyo, Kecamatan Lempung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1602131206650005. -----

**Sekretaris** :

**Tuan SAIFUL ANSORI**, Lahir di Kuta Pandan, pada Tanggal 25-04-1980 (Duapuluh Lima April Tahun Seribu Sembilanratus Delapanpuluh), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal Jl. Datu, Rukun Tetangga : 003, Rukun Warga : 003, Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 180804254800003. -----

**Bendahara** :

**Tuan EDI SUPENO**, Lahir di Pisang Baru, pada Tanggal 23-03-1979 (Duapuluh Tiga Maret Tahun Seribu Sembilanratus Tujuhuluh Sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal Sri Tanjung II, Rukun Tetangga : 003, Rukun Warga : 003, -----

Desa Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung,  
Kabupaten Way Kanan, Pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Nomor : 1808142303790001. -----

**c. PENGAWAS** : -----

**Ketua** :

**Tuan AGUS ALIFULLOH**, Lahir di Pisang Baru,  
pada Tanggal 01-01-1971 (Satu Januari Tahun  
Seribu Sembilanratus Tjuhpuluh Satu), Warga  
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal  
di Pisang Indah, Rukun Tetangga : 01, Rukun  
Warga : 01, Kelurahan Pisang Indah, Kecamatan  
Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, Pemegang  
Kartu Induk Kependudukan Nomor :  
1808140101710003, berdasarkan Surat  
Keterangan Domisili Nomor : 140/010/P-  
/SK.D/IV/2016 Tanggal 21-04-2016 (Duapuluh  
Satu April Tahun Duaribu Enambelas), yang  
dikeluarkan oleh Sekretaris Kampung Pisang  
Baru, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way  
Kanan. -----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan  
dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-  
masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina  
pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan  
dan/atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri  
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain  
dikuasai untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas  
Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat  
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga  
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk  
mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen  
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan  
tindakan lainnya yang mungkin diperlukan. -----

**DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Way Kanan, pada hari dan  
tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : --

1. Nyonya ELLEN TARIA, dilahirkan di Taman Asri, pada Tanggal 11-02-1992 (Sebelas Februari Tahun Seribu Sembilanratus Sembilanpuluh Dua), Warga Negara Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Pramuka, Rukun Tetangga : 003, Rukun Warga : 002, Kelurahan Taman Asri, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1808045102920005. -----

2. Nona NURUL ISNAENI YOGA PUTRI, Lahir di Rembang, pada Tanggal 04-05-1995 (Empat Mei Tahun Seribu Sembilanratus Sembilanpuluh Lima), Warga Negara Indonesia, Bertempat Tinggal di Way Kanan, Rukun Tetangga : 001, Rukun Warga : 001, Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1808044405950004. -----

- Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

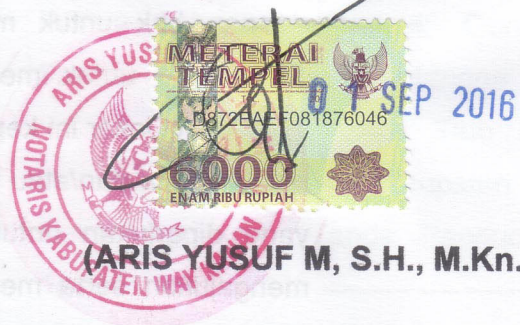
- Selanjutnya para penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanan/kiri, pada lembar tambahan yang disediakan untuk keperluan akta ini, demikian sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -----

- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

### NOTARIS KABUPATEN WAY KANAN



(ARIS YUSUF M, S.H., M.Kn.)